KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

JALAN RAYA SETU, CIBUNTU, CIBITUNG, BEKASI JAWA BARAT 17520 | TELP : 8253352 : 8253353 | Email : bpljskb@kemenhub.go.id Home Page : hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bpljskb

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
NOMOR : SK - BPLJSKB 76 Tahun 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2026

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2026**

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis output yang digunakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk menetapkan:

a. rencana kinerja tahunan;
b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
d. menyusun laporan kinerja; dan
e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KETIGA : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:

a. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Penjaminan Mutu, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian sebagai berikut:

a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
b. melakukan evaluasi atas pelaksaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

IMAN SUKANDAR, MT
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19710418 199803 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kasubag Keuangan dan Tata Usaha BPLJSKB.

Lampiran Surat Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
Nomor : SK - BPLJSKB 76 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2026

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya

DEFINISI

Indikator yang menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya dihitung berdasarkan jumlah realisasi Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya terhadap target Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya yang telah ditentukan.
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya berupa pemeliharaan/peningkatan/perbaikan peralatan pengujian beserta penunjangnya yang dilakukan rutin selama periode tahun berjalan.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	=	Realisasi Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya

SATUAN

Unit

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
8	8	9	10	10

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.2	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya

DEFINISI

Indikator penunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat berupa proses kalibarasi dan verifikasi peralatan pengujian kendaraan bermotor. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan.

Indikator Kinerja Kegiatan Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya dihitung berdasarkan realisasi jumlah kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya terhadap target kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan.

Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya, diharapkan mampu membantu manajemen dalam meningkatkan pelayanan pengujian tipe di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	=	Realisasi kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya

SATUAN

Unit

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
35	35	36	37	37

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.3	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe

DEFINISI

Merupakan Indikator yang bertujuan untuk mendukung kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor kegiatan yang akan dilaksanakan baik berupa sistem, metode, maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe dihitung berdasarkan jumlah realisasi Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe terhadap target Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe diharapakan mampu membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	=	Realisasi Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
5	7	7	7	7

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Penjaminan Mutu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.4	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Peningkatan Kualitas Layanan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi layanan kepada pengguna jasa. Inovasi yang dilakukan oleh BPLJSKB merupakan inovasi baik menggunakan teknologi informasi maupun berupa penyempurnaan bisnis proses/tata kelola BLU, layanan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang dirasakan langsung dampaknya kepada pengguna jasa BPLJSKB

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian diukur berdasarkan akumulasi tahapan penerapan yang dilaksanakan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Indikator ini diharapkan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe dan peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Tahapan Bobot:

1 Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi	20%
2 Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan	25%
3 Inovasi layanan dalam tahap uji coba	25%
4 Inovasi layanan sudah diluncurkan/diterapkan, meski belum secara penuh	30%
5 Inovasi layanan sudah diluncurkan/diterapkan secara penuh	20%
6 Inovasi layanan sudah berdampak pada peningkatan layanan	30%

SATUAN

%

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
100	100	100	100	100

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Pelayanan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.5	Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe berupa pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan pengujian tipe atau penunjang pengujian tipe. Selain itu, Indikator pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe bertujuan untuk meningkatkan fasilitas sarana layanan pengujian tipe sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe diukur berdasarkan jumlah realisasi Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini diharapakan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe	=	Realisasi Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe

SATUAN

Unit

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
7	12	12	13	13

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.6	Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan berupa pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan penunjang. Selain itu, Indikator pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang operasional perkantoran.
Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang diukur berdasarkan jumlah realisasi Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini diharapakan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang	=	Realisasi Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang

SATUAN

Unit

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
2	10	10	11	11

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian, Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
PENINGKATAN KEPATUHAN KENDARAAN BERMOTOR MEMATUHI *ACTIVE* DAN *PASSIVE SAFETY*			
SASARAN KINERJA		**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**	
SK3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*	IKK 3.2.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor

DEFINISI

Merupakan indikator yang mengukur kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan pengujian yang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor.
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan realisasi Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap target Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	=	Realisasi Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor

SATUAN

Unit

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
1.200	1.300	1.310	1.320	1.350

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Pelayanan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
PENINGKATAN KEPATUHAN KENDARAAN BERMOTOR MEMATUHI *ACTIVE* DAN *PASSIVE SAFETY*			
SASARAN KEGIATAN		**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**	
SK3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*	IKK 3.2.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian hasil pembuatan dan/atau perakitan rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan terhadap data rancang bangun yang diajukan oleh perusahaan karoseri sebelum dioperasikan di jalan.

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman diukur berdasarkan realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman terhadap target Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	=	Realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
579	637	701	771	848

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Penjaminan Mutu Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
PENINGKATAN KEPATUHAN KENDARAAN BERMOTOR MEMATUHI *ACTIVE* DAN *PASSIVE SAFETY*			
SASARAN KEGIATAN		**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**	
SK3.2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*	IKK 3.2.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor

DEFINISI

Indikator Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor merupakan kegiatan pematauan dan evaluasi terhadap pelayanan pengujian tipe yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor diharapakan mampu membantu kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	=	Realisasi Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
39	40	40	42	42

PENANGGUNG JAWAB

Seksi Pelayanan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)

DEFINISI

Merupakan Indikator yang mencerminkan kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	=	Realisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
6	6	6	7	8

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

DEFINISI

Merupakan indikator yang berisi k**egiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).**

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	=	Realisasi Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
5	5	5	6	6

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

DEFINISI

Indikator Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	=	Realisasi Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
10	10	10	12	12

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)

DEFINISI

Indikator Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) merupakan Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	=	Realisasi Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
10	10	10	12	12

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) merupakan kegiatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK yang menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) = Realisasi Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
2	2	2	2	2

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan = Realisasi Kegiatan Pengawasan Kearsipan

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
2	2	2	2	2

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

DEFINISI

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Selain itu, menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	=	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Merupakan standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor).
Kegiatan indikator Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat **berupa pengembangan kompetensi SDM, motivasi pegawai dan termasuk kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan.**

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	=	Realisasi Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
3	3	3	3	3

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	=	Realisasi Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
3	3	3	3	3

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

SASARAN PROGRAM			
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
INIDKATOR KINERJA PROGRAM			
INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT			
SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK4	Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat

DEFINISI

Merupakan alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.

SUMBER DATA

Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

CARA MENGHITUNG

Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	=	Realisasi Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat

SATUAN

Kegiatan

TARGET

2025	2026	2027	2028	2029
1	1	1	1	1

PENANGGUNG JAWAB

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

IMAN SUKANDAR, MT
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19710418 199803 1 011